

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### 1. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Secara etimologi istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda yaitu *politie* yang di ambil dari bahasa Latin *politia*, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*. *Politeia* diartikan sebagai warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah polisi kemudian mengalami perubahan. Polisi tidak lagi dipakai untuk menyebut semua usaha dan kegiatan negara dari warga negara kota Athena pada saat itu, melainkan istilah polisi kemudian diartikan sebagai suatu pranata yang aktivitasnya mengatur ketertiban umum atau

---

<sup>7</sup> Rianegara, M. D. 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 35

masyarakat dan penegakan hukum sebagai akibat dari pelanggaran akan hukum itu sendiri. Indonesia sendiri menggunakan istilah Polisi yang merupakan proses serapan dari bahasa Belanda yaitu *Politie*. Perkembangan istilah tersebut di Indonesia dikenal melalui konsep Catur Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang membagi urusan pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian yakni *Bestur* (pemerintahan), *Politie* (polisi), *Rechtspraak*, dan *Regeling*. Polisi sudah dipisahkan dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri serta termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Aturan mengenai kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Lahirnya Undang-Undang tentang kepolisian tersebut didasarkan pada paradigma baru, yaitu berkaitan dengan munculnya semangat demokratisasi dan reformasi di Indonesia pada saat itu, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara menyeluruh yang meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukum di Indonesia, maka Pemerintah membentuk beberapa Undang-undang terkait yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri, yaitu : (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; (2) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Polri wajib mempedomani dan mentaati ketentuan beberapa undang-undang tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas penegakan Hukum.<sup>8</sup>

Istilah polisi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dimasyarakat.<sup>9</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang Polisi yaitu petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian tentang polisi yaitu suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional).<sup>11</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>8</sup> Yoyok Ucock Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 171.

<sup>9</sup> Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Cetakan I*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 525.

<sup>11</sup> Momo Kelana. 2003. *Hukum Kepolisian*. Gramedia. Jakarta, hlm 59.

<sup>11</sup> Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthi Jaya, Jakarta, hlm 31

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Secara substansial polisi sangat berperan dalam tercapainya keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat di Indonesia.

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (4) adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”<sup>12</sup> Fungsi kepolisian lain menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian yang lain menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1 yang substansinya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara kermanan dalam negeri.<sup>13</sup>

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.163.

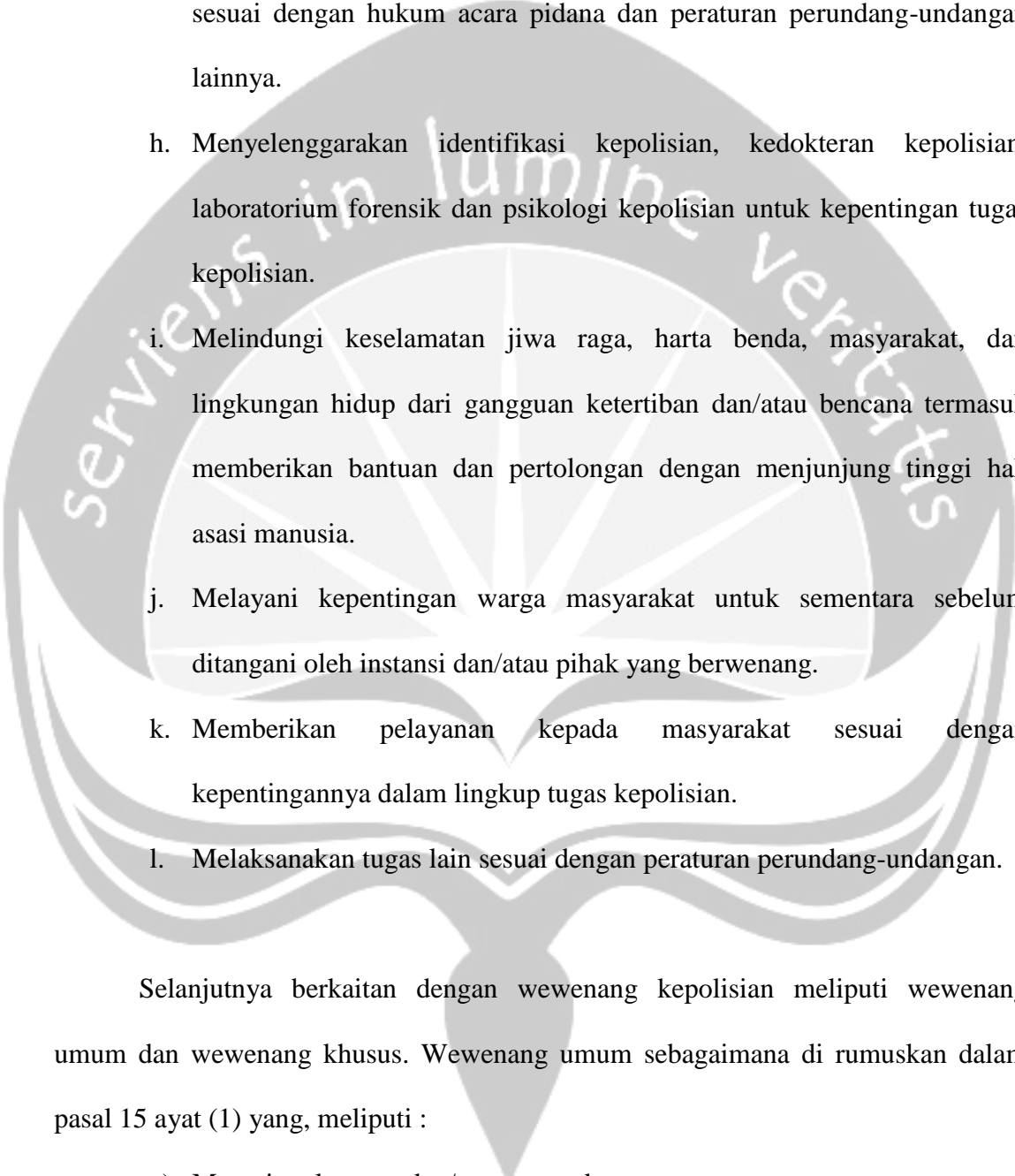
<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 166.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

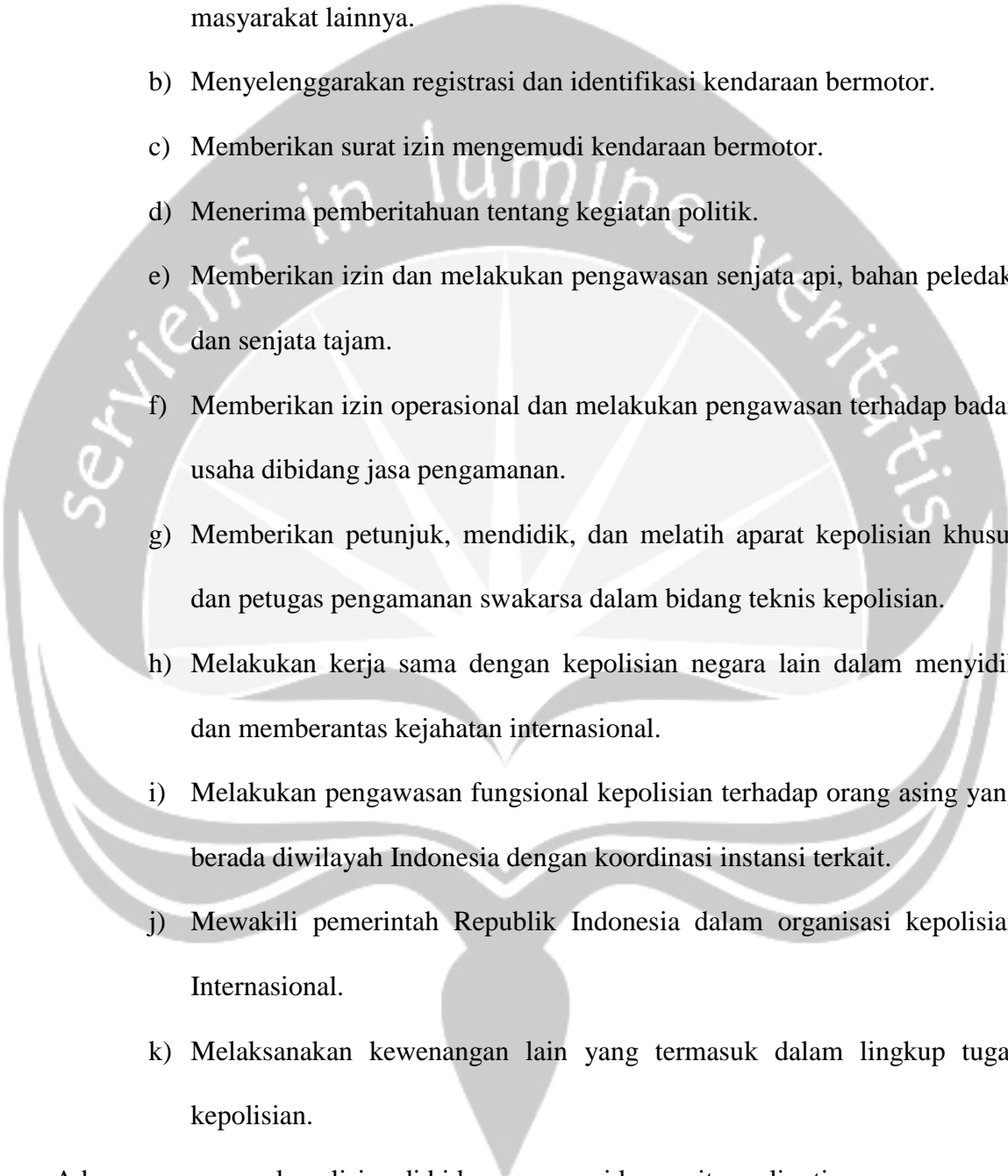
- 
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana di rumuskan dalam pasal 15 ayat (1) yang, meliputi :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- l) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

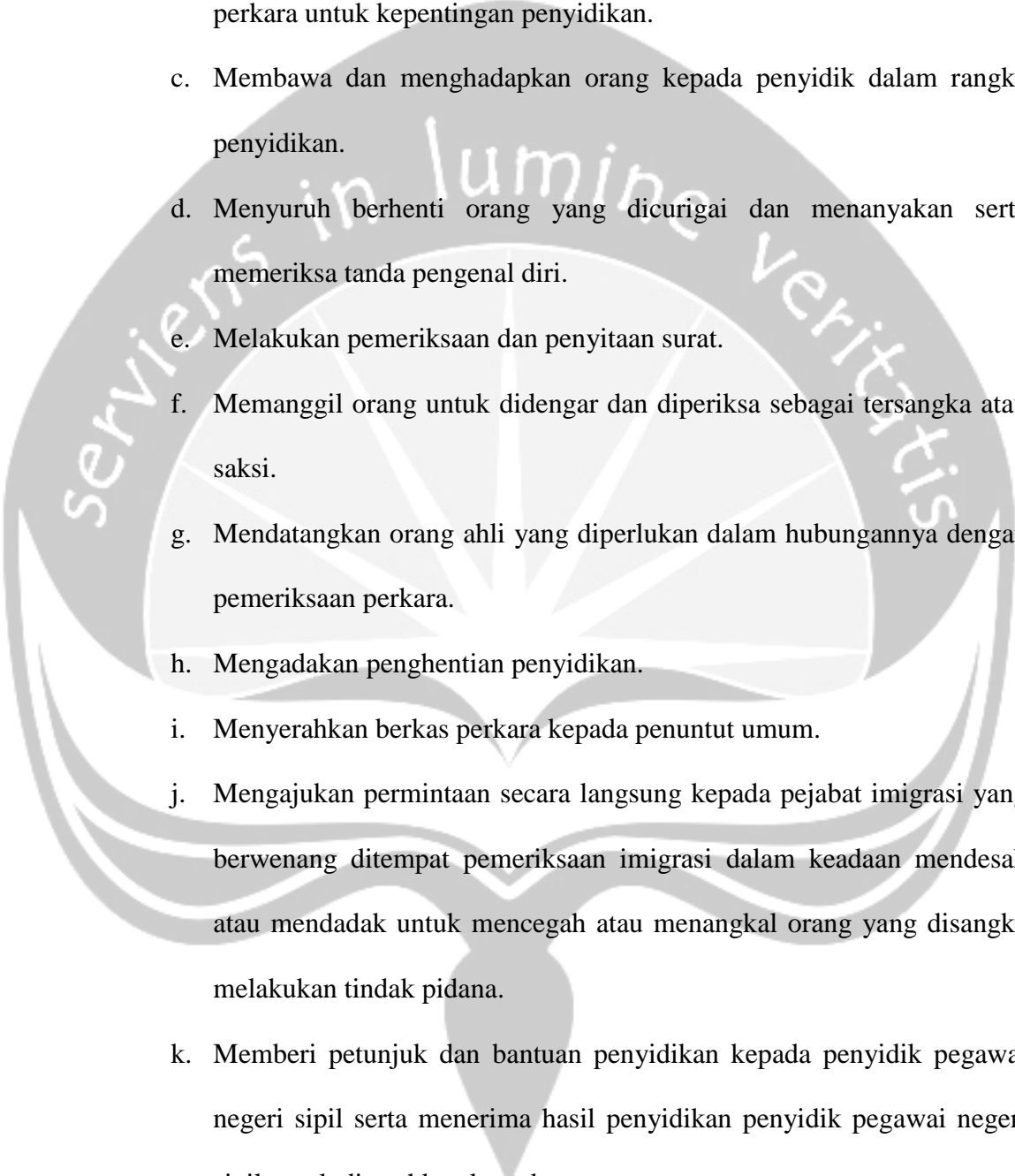
Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi: PERTAMA, kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2), dan KEDUA, wewenang penyelidikan atau penyidikan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- 
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
  - b) Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  - c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
  - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
  - e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
  - g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
  - h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
  - i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
  - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional.
  - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang kepolisian di bidang proses pidana yaitu meliputi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.



- 
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Kepolisian memiliki beberapa wewenang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Kemudian didalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Menurut KUHAP Pasal 4 dan 6 menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang sebagaimana ditekankan

dalam Pasal 5 KUHAP : Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Tugas dan wewenang Polri sebagaimana telah diuraikan di atas dilaksanakan dengan tetap berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan di depan, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini lebih ditegaskan lagi bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan Negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) tidak lagi sebagai unsur Angkatan bersenjata Republik Indonesia, yang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditetapkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di identikkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya, para ahli-ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pengertian dari tindak pidana, antara lain :

---

<sup>14</sup> Yoyok Ucok Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 177

a. E.Utrech

Mengartikan *strafbaarfeit* atau tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut sebagai delik. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, tidak semua unsur yang di singgung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan sebagai unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu: perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum.<sup>15</sup>

b. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum. Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:

“pertama, untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Kedua, agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-undang. Ketiga, setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu arangan atau kewajiban menurut Undang-

<sup>15</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau *onrechtmatige Handeling*”.<sup>16</sup>

Sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

#### c. Van Hammel

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana yang dijelaskan oleh Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi lima (5) unsur, yaitu:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
4. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6

d. Pompe

Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman pelaku itu penting demi terpeliharanya tertib hukum dan mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat teoritis. Dalam teorinya tidak ada seorangpun yang dapat di hukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan dilakukan dalam bentuk schuld yaitu dengan sengaja atau tidak sengaja, untuk dapat dipidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum jadi meskipun perbuatan memenuhi rumusan dalam delik namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana maka orang tersebut belum dapat dipidana, untuk pemidaan masih perlu adanya syarat bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, sudarto mengatakan:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (Subjective Guilt). Perkataan orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. (keine strafe ohne shculd atau geen straf zonder schud atau nula poena sine culpa)”<sup>19</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh Sudarto tersebut dapat disimpulkan

bahwa kesalahan menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana orang di pidana tergantung dari apakah perbuatannya mengandung syarat suatu kesalahan atau tidak.

#### e. Moeljatno

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah :

“perbuatan yang dilarang oleh suau aturan hukum, larangan yang sama disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepadaa orang yang telah menimbulkan kejadian itu”

Definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan Moeljatno diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam pengertian tentang tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Moeljatno juga menegaskan, untuk adanya pidana

<sup>19</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 85



tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak.<sup>20</sup>

Kesimpulan yang dapat di tarik dari definisi di atas tentang tindak pidana adalah perbuatan yang di larang untuk dilakukan baik sengaja ataupun tidak yang apabila di langgar mempunyai sanksi hukum yang dapat di paksakan terhadap pelaku.

## 2. Pengertian Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana Kriminal

Pengertian tersangka dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Di dalam pasal tersebut, ditentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang dinyatakan menjadi tersangka jika ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi di tambah dengan satu alat bukti yang sah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Singkatnya, dia baru diduga melakukan tindak pidana. Tersangka itu belum tentu bersalah.

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi : (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 8

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan :

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger) atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria :

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu, untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada

umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda*, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- 1) Harus ada kerjasama secara fisik.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana\

Turut serta melakukan (*medpleger*), oleh *Memorie van Toelichting (MvT)* dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken)

Syarat-syarat uit lokken :

- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) Orang yang di gerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

e. Prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana

Prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana dalam KUHAP memiliki SOP (standart operating procedure) tertentu agar tindakan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Jika pelaku hukum dalam hal ini adalah penegak hukum tidak mengindahkan prosedur hukum acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan muncul perspektif bermacam-macam dari masyarakat.

Dalam tahapan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Contoh kecil unsur yang sangat penting adalah mengenai Hak Tersangka untuk memperoleh perlakuan manusiawi. Acuan dasar dalam melakukan penangkapan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana adalah proses pemeriksaan dalam tindak pidana baik yang dilakukan polisi, kejaksaan dan pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam KUHAP). Pengertian penangkapan sendiri dalam KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam pada itu secara garis besar tahapan dalam melakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

Tahap I : pelaporan/pengaduan :

- a. Bebas menyampaikan informasi atas suatu kejadian.
- b. Setiap pelapor/pengadu diperlakukan sama oleh penyidik.
- c. Bebas dari diskriminatif, intimidasi dan ancaman lainnya dari penyidik.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelapor/pengadu.
- e. Mendapat surat tanda terima pelaporan dari polisi.

Tahap II : penyelidikan dan penyidikan :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam tahap ini ada hak-hak tersangka yang perlu dilindungi dalam proses penangkapan adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan harus dilakukan oleh petugas dari kepolisian.
- b. Membawa surat tugas.
- c. Jangka waktu penangkapan adalah 1 hari atau 24 jam.

Selain itu dalam proses pemeriksaan juga ada hak hak tersangka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Tersangka harus diperlakukan adil
- b. Tidak boleh mengalami kekerasan atau tekanan
- c. Informasi mengenai tingkatan pemeriksaan dan statusnya. Tersangka di tahap penyidikan dan penuntutan, terdakwa ketika kasus sudah sampai di pengadilan sampai sebelum putusan hukum memiliki kekuatan hukum tetap. Terpidana jika eksekusi telah dilakukan.
- d. Tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum sejak proses penyidikan. Bahkan ia berhak menolak memberiketerangan bila belum didampingi penasihat hukum.

Selain itu juga, dalam proses penggeledahan dan penyitaan ada hak-hak tersangka yang perlu di perhatikan juga.

- a. Harus ada surat izin dari ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan (kecuali dalam keadaan mendesak, polisi bias melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin ketua PN)
- b. Penggeledahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi
- c. Pemilik rumah yang di geledah atau disita harus mendapat berita acara dari polisi mengenai penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Yang paling penting juga adalah hak-hak tersangka selama proses penahanan :

- a. Harus ada surat perintah penahanan

- b. Yang bisa memerintahkan penahanan adalah polisi, penuntut umum dan hakim yang mengadili
- c. Penahanan bisa diperpanjang tapi harus ada surat perintah penahanan lanjutan, berisi identitas tersangka dan alasan penahanan
- d. Tembusan surat penahanan itu harus diberikan kepada keluarga tersangka
- e. Bisa minta penangguhan penahanan dengan jaminanuang atau orang.

Alasan atau dasar seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan, apabila tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa :

- a. Akan melarikan diri
- b. Merusak atau melarikan barang bukti
- c. Dan atau mengulangi perbuatannya.

### 3. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain korban) dan



suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (Criminal behavior) adalah kelakuan yang melanggar Undang-undang hukum pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-undang hukum pidana.<sup>21</sup>

Pengertian kriminalitas menurut beberapa para ahli yaitu:

#### 1. Menurut R. Susilo

Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

#### 2. Menurut M.v.T

Kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

<sup>21</sup> <https://definisi-menurut-para-ahli.blogspot.co.id/2017/05/5-definisi-kriminalitas-menurut-para.html>  
di akses tanggal 11 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB

### 3. Menurut M. A. Elliot

Kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

### 4. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

Kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut di hukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.<sup>22</sup>

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk tindak kriminal seperti:

#### a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. Pencurian

---

<sup>22</sup> *ibid*

melanggar pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

b. Tindak Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama 2 th 8 bln tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminal merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

d. Penganiayaan

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

e. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak di klasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan semi sengaja. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat, untuk itu agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril. Upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antara lain:

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa itu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

#### b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam dan masyarakat.
2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.<sup>23</sup>

Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

Menurut Abdussalam kriminalitas atau kejahatan dibagi menjadi dua yaitu menurut hukum (yuridis) dan non hukum atau kejahatan menurut sosiologis.

a. Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman.

b. Kejahatan menurut non hukum, atau menurut sosiologis.

---

<sup>23</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2267/12/BAB%20II.pdf> Di Akses Tanggal 11 Mei 2018 Pukul 20.30 WIB

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola-pola yang sama.<sup>24</sup>

Penggolongan jenis-jenis Kriminal menurut Lombroso :

- a. *Born criminal* yaitu orang berdasarkan pada *doktrin atavisme* (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.<sup>25</sup>

Kriminal menempati posisi yang strategis dalam bidang ilmu tentang kejahatan di mana *hoefnagels* menunjukkan bahwa cabang-cabang ilmu tersebut terdiri atas *science* atau *diciplie* serta *allied science*. Dengan *science* atau *discipline* berarti merupakan sistem ajaran tentang objeknya, yakni kejahatan. Dalam kelompok ini terdapat gagasan ilmu seperti antropologi kriminal, psikologi kriminal, sosiologi kriminal, maupun jurnalisme kriminal, dan statistik kriminal. *Diseberang science* terdapat gagasan ilmu yang tergolong ilmu-ilmu yang membantu menjelaskan

<sup>24</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> di akses tanggal 11 Mei 2018 Pukul 22.00 WIB

<sup>25</sup> <http://okvyan-kriminologi.blogspot.co.id/2010/06/tugas-1.html> di akses tanggal 11 Mei 2018 Pukul 21.00 WIB

disiplin pokoknya di antaranya viktimologi, penologi maupun jurnalisme pada umumnya. Kedua gagasan ilmu bertemu pada satu titik, yakni kriminologi umum (*general criminology* yang pada satu sisi membahas tentang etiologic kriminal, yakni membicarakan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik dari faktor biologis, sosiologis, maupun politis. Pada sisi lain terdapat criminal policy, yakni tentang respon (masyarakat) terhadap kejahatan. Artinya bagaimana masyarakat bereaksi atau memberi tanggapan terhadap fenomena kejahatan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminalitas Klitih di DIY**

#### **1. Pengertian Umum Klitih**

Klitih atau Klithih (klithihan atau nglithih) merupakan sebuah kosa kata dari bahasa Jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah kegiatan atau aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan atau hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. Klitih jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan keluyuran.

Konotasi dari kata Klitih menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena banyak orang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai orang lain menyebutnya aksi klitih, walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan merupakan tindak klitih atau keluyuran.



Perilaku klitih atau ngelitih bisa dikatakan sebagai perilaku sosial yaitu tingkah laku klitih atau ngelitih berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Klitih merupakan istilah yang merujuk kepada Pasar Klitikan Yogyakarta, artinya adalah melakukan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan klitikan. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta sudah sejak era 1980-an dan 1900-an dan 1990-an. Seiring berjalannya waktu, klitih mengalami pergeseran makna. Klitih kini identik dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Tidak ada yang tau kapan pertama kali istilah ini munculdan mengalami pergeseran makna. Istilah ini muncul untuk menggantikata tawuran, setelah peristiwa pembacokan yang marak terjadi sepanjang 2011 sampai 2012. Klitih sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang, istilah ini kembali populer setelah tahun 2014, korban kembali berjatuhan akibat klitih. Korban tidak hanya sama pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat umum.

Klitih, satu kata yang asing di telinga orang dari luar Yogyakarta. Tapi bagi orang Yogyakarta, klitih merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak kekerasan jalanan yang dilakukan kalangan pemuda atau pelajar. Pelaku klitih ini biasanya terdiri lebih dari satu orang menggunakan senjata tajam seperti pedang, golok, dan juga gir sepeda motor yang telah di modifikasi. Aksi klitih kebanyakan dilakukan pelaku di malam hari. Para pelaku melakukan aksi kekerasan tidak

pandang bulu. Bahkan kebanyakan mereka menyerang orang yang tidak dikenalnya. Ruas jalan yang sepi hingga tempat nongkrong, seperti warung bubur kacang ijo (Burjo) atau warung kopi menjadi incaran parah pelaku klitih. Tidak hanya luka senjata tajam yang di derita korban. Beberapa kejadian klitih bahkan membuat nyawa orang yang tak bersalah melayang. Istilah klitih kini juga sering di gunakan pihak kepolisian dan pemerintah di daerah Yogyakarta. Bahkan pada akhir 2016 lalu, saat laporan akhir tahun Polda DIY menggunakan klitih untuk menggambarkan kekerasan di kalangan pelajar. Polda DIY mencatat ada 43 kejadian klitih di wilayah setempat.

Klitih sekarang sudah merajalela sampai di daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Biasanya klitih dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 10 motor atau lebih secara berboncengan. Biasanya geng-geng ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah, tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut, ketidakpuasan antara kedua geng akibat kalah dalam suatu pertandingan, saling ejek antara kedua geng.

## 2. Peran dan Upaya kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama AKP. Endro Prasetyandoko S.H, selaku Sub Direktorat (Subdit) di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dikatakan bahwa klitih merupakan suatu istilah yang biasa digunakan

masyarakat Yogyakarta untuk menyebut tindakan kriminal yang dilakukan anak remaja. Kejahatan tersebut bisa berupa tindak pidana perampokan, pembacokan, penganiayaan bahkan sampai pada tindakan kriminal pembunuhan. Dikatakan bahwa polisi dalam melakukan peran dan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Kriminalitas yang kian marak membuat resah masyarakat dianggap sangat membahayakan, untuk itu agar tidak menambah banyak korban kasus kriminal haruslah tercipta upaya-upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak banyak lagi yang mengalami kerugian materil maupun moril. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif sangat di butuhkan agar sebelum terjadi suatu tindak pidana, polisi dapat lebih dulu mencegahnya, dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tindakan klitih sangat merugikan diri sendiri. Upaya Preventif ini dikatakan oleh narasumber menjadi upaya yang sangat baik untuk mencegah terjadinya tindakan klitih di Yogyakarta.

Upaya Represif juga masih sangat dibutuhkan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk memproses para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Polisi akan melakukan penyidikan dan membuat BAP dan untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak Kejaksaan. Terhadap kasus penganiayaan jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 351 KUHP. Sanksi pidana yang terdapat dalam

pasal ini dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kriminal sehingga pelaku klitih tidak jera. Tujuan sanksi pidana yang lebih berat diharapkan mampu mengatasi permasalahan tindak kriminal klitih, orang yang akan melakukan suatu tindakan yang dilarang menurut KUHP menjadi takut untuk melakukan perbuatan pidana mengingat sanksi yang akan di jatuhkan sangat berat.

